



INTEGRASI JAMKESDA KE JKN PERLU DISOSIALISASIKAN

Warga Tak Mampu Harus Tetap Terlindungi

YOGYA (KR) - Penduduk Kota Yogya yang tidak mampu namun belum masuk dalam database peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, harus tetap terlindungi. Terutama dalam mengakses layanan kesehatan meski saat ini sudah dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami melihat, masih banyak penduduk yang sebelumnya memegang Jamkesda yang datang ke Balaikota untuk mendaftar BPJS Kesehatan melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD). Sebenarnya mereka tidak perlu mendaftar karena sebelumnya sudah masuk Jamkesda," urai anggota Komisi D DPRD Kota Yogya Dwi Budi Utomo, Sabtu (5/1).

Oleh karena itu, bagi yang belum menjadi peserta JKN namun tengah mengakses layanan kesehatan seharusnya tetap dibiayai Pemkot melalui Jamkesda. Kemudian untuk selanjutnya segera mengurus ke loket Jamkesda agar dimasukkan dalam database JKN melalui program PDPD.

Dwi Budi, menilai sosialisasi integrasi Jamkesda ke JKN yang dilakukan per Januari 2019 harus terus digalakkan. Hal ini lantaran hingga awal bulan ini masih banyak penduduk Kota Yogya yang mendatangi loket Jamkesda. "Intinya, jangan sampai ada warga sakit dan periksa ke rumah sakit ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri karena belum masuk database JKN," tandasnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogya Agus Sudrajat, sebelumnya menjelaskan kepesertaan JKN melalui program PDPD mendapatkan respons cukup tinggi. Melalui program itu Pemkot Yogya akan membayarkan iur kepesertaan bagi penduduk Kota Yogya di kelas III. Terutama bagi warga yang sebelumnya sudah menjadi peserta JKN di kelas I dan II namun memiliki tunggakan selama setahun terakhir. "Warga tersebut dipersilakan mendaftar di loket Jamkesda kompleks Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogya sejak 17 Desember 2018. Sampai sekarang pun masih kami layani," jelasnya.

Oleh karena itu, meski berlaku efektif per Januari 2019, tapi jika ada warga yang mendaftar setelah Januari tetap akan dilayani. Hanya, pendaftaran memang harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan kecuali oleh anggota keluarganya dengan surat kuasa. Pemkot Yogya mengalokasikan anggaran Rp 24,8 miliar melalui APBD 2019 untuk membayar premi kepesertaan PDPD JKN yang dialokasikan bagi 82.000 peserta. Sedangkan pada tahun anggaran 2018, sudah ada sebanyak 46.000 warga Kota Yogya yang menjadi penerima bantuan iur JKN. Seluruhnya adalah warga tidak mampu. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005